


LEMBAR EDARAN

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tanggal	Tingkat Surat
1493/Dt.8.1/11/2017	02 Nopember 2017	Rahasia / <u>Segera</u> / Biasa
<p>Diterima dari : Deputi Bidang Pendanaan</p> <p>No./ Tgl Surat : 270/D.8.ND/11/2017 02 Nopember 2017</p> <p>Perihal : Penyampaian Usulan Kajian Strategis dan Policy Paper Lingkup Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Tahun 2018</p>		
Diteruskan Kepada :		Disposisi :
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Tati Lies Aryati <input checked="" type="checkbox"/> 2. Riza Hamzah <input checked="" type="checkbox"/> 3. Mukhtiali <input checked="" type="checkbox"/> 4. Sugeng Wahyu Hendarto <input type="checkbox"/> 5. Beby Hanzian <input checked="" type="checkbox"/> 6. Yustina Handayani Wijayanti <input type="checkbox"/> 7. Tien Iswartini <input type="checkbox"/> 8. Dadan Kusdarsana <input type="checkbox"/> 9. Ino Sutrisno Staf Pendukung <input type="checkbox"/> 1. Firman Perangin-angin <input type="checkbox"/> 2. Adi Nurhadi <input checked="" type="checkbox"/> 3. Eftin Ula Kurnia <input type="checkbox"/> 4. Sahna Putri Aselira <input type="checkbox"/> 5. Bonataon M.T.V. Simandjorang <input type="checkbox"/> 6. Pristi N.K. Panggabean <input type="checkbox"/> 7. Kristianto Wibowo <input type="checkbox"/> 8. Muhamad Faisal Siddiq <input type="checkbox"/> 9. Derry Afriandri <input type="checkbox"/> 10. Reezali Raharjaya <input type="checkbox"/> 11. Faizah Aulia Rahmah		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoreksi <input type="checkbox"/> Teliti/Pendapat dan Laporkan <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Copy dan Kembalikan <input type="checkbox"/> Hadiri/Wakili <input type="checkbox"/> Untuk di File
<p>Catatan : <i>1cha 1corrd : Ole kita siapkan. Policy paper Renbang -> siapkan time table pelaks. - rekrut yg akan mengerjakan, ke APBN utk cukup & cari sumber penbay nya (tanya ADB)</i> <div style="text-align: right;"><i>3/11/2017</i>  Teni Widuriyanti</div> </p>		

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


NOTA DINAS

No. 270/D.8.ND/11/2017

Kepada Yth. : Sesmen PPN/Sestama Bappenas
Dari : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Perihal : Penyampaian Usulan Kajian Strategis dan *Policy Paper* Lingkup
Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan Tahun 2018
Tanggal : 02 November 2017

Menindaklanjuti Memorandum Saudara No. 1613/Ses.M/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Usulan Kajian Strategis, terlampir disampaikan usulan kajian strategis (disertai abstrak) dan *policy paper* lingkup Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan Tahun 2018. Mohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


Kennedy Simanjuntak

Tembusan Yth:

1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan:
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan:
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral:
5. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan

KAJIAN STRATEGIS
“PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG TERINTEGRASI”
KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

ABSTRAK

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, khususnya untuk memastikan bahwa proyek-proyek prioritas berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun salah satu bentuk implementasi pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah tersebut yaitu terbangunnya Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA lebih lanjut disepakati sebagai *backbone* dalam penyusunan sistem informasi perencanaan dan penganggaran, sehingga KRISNA diharapkan dapat dikembangkan sebagai *tools* untuk menjadi *e-planning* dan *e-budgeting* di masa yang akan datang.

Perkembangan ekonomi saat ini, kemampuan untuk meningkatkan penerimaan negara terbatas dan memberikan implikasi bahwa proses penganggaran dan pengalokasian belanja negara harus dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas belanja melalui perkuatan alokasi pada prioritas, serta mengembangkan alternatif sumber pendanaan termasuk pemanfaatan pembiayaan kreatif serta mekanismenya. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas perlu menyusun sebuah strategi pendanaan prioritas pembangunan 2020-2024 yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu strategi pendanaan prioritas pembangunan 2020-2024 yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Adapun cakupan/ruang lingkup di dalam kajian ini akan meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan pendanaan prioritas RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016, dan 2017 yang meliputi reviu alokasi pada prioritas dan integrasi pendanaan (2015-2018), serta pendekatan pendanaan terhadap program/kegiatan dan proyek prioritas.
- b. Alternatif sumber pembiayaan untuk pendanaan prioritas, yang mencakup berbagai sumber pembiayaan termasuk pemanfaatan pembiayaan kreatif, serta strategi pemanfaatan sumber pembiayaan berdasarkan karakteristik proyek, *cost and benefit* proyek, dan lain sebagainya.
- c. Integrasi dan pengendalian pendanaan prioritas antar sumber pendanaan dengan pendekatan sektor (misalnya pariwisata dan kesehatan/*kasus stunting*) dan pendekatan kewilayahan (misalnya Kawasan Industri/KEK dan Kawasan Pariwisata).

USULAN *POLICY PAPER* TAHUN ANGGARAN 2018

LINGKUP KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

No.	Nama Direktorat	Judul/Topik Policy Paper
1	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	Pengembangan dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan
2	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Review Integrasi Pendanaan Pembangunan Dalam Mendukung Prioritas Nasional
3	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral untuk Menunjang Prioritas Nasional atau <ul style="list-style-type: none"> • Alternatif Pembiayaan
4	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	Integrasi Pendanaan Luar Negeri Multilateral untuk Menunjang Prioritas Nasional
5	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	Tata Laksana dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional